

Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggungan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S

Hendra S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364856&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Jaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyak digunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunya APHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenai mekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinya pembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Selain itu dalam rangka menunjang penelitian yang dilakukan, maka penulis juga mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Debt guarantees in the form of land now very widely used by lenders. That debt guarantees tied to the PPAT deed named by APHT which is authentic deed. PPAT as public officer given authority to make authentic deeds with regard to specific legal acts concerning land security rights and condominium ownership right. But in reality there are many authentic deeds sued and eventually canceled such as APHT. Problems are focused by the author in this thesis are on the APHT cancellation mechanism, the effort of PPAT to minimize the cancellation of APHT and SHT, and conformity verdict number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST with the provisions of the applicable law. This research was conducted with the

normative juridical form. The data used in this research is a secondary data obtained from literature data. Beside that in this research, in order to support the research conducted, the authors also collected data by conducting interviews with relevant parties.